

PENGARUH KOORDINASI DAN KOMUNIKASI CAMAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

Cecep Supriatna¹, Awan Setiawan², Yeti Rohayati³
cecepgorbacev102@gmail.com¹, awan2425@gmail.com², yetirohayati@gmail.com³

¹Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

²⁻³Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh koordinasi dan komunikasi Camat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, anggota sampel dipilih berdasarkan kapasitasnya memiliki kemampuan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Koordinasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (2) Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Komunikasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat; (3) Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan besarnya pengaruh 52,4% dan 47,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti. Dengan demikian variabel Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Kata Kunci : Koordinasi, Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of sub-district head coordination and communication on community empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency. The research method used in this study is descriptive analysis, with a quantitative approach. Data collection techniques used literature studies and questionnaires. The population in this study was all government officials and the community in Rancakalong District, Sumedang Regency. Sample members were selected based on their capacity and ability to empower communities. The total sample size in this study was 84 people. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis techniques used were simple and multiple linear regression analysis.

The results of the study indicate: (1) There is a positive and significant influence of sub-district head coordination on community empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency. Thus, sub-district head coordination is a crucial factor that can influence community empowerment; (2) There is a positive

and significant influence of sub-district head communication on community empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency. Thus, sub-district head communication is a crucial factor that can influence community empowerment; (3) There is a positive and significant influence of Sub-district Head Coordination and Sub-district Head Communication together on Community Empowerment in Rancakalong District, Sumedang Regency, with a large influence of 52.4% and 47.6% influenced by other variables or factors that were not included in the research. Thus, the variables Sub-district Head Coordination and Sub-district Head Communication together are important factors that can influence Community Empowerment.

Keywords : *Coordination, Communications, Community Empowerment.*

1. PENDAHULUAN

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas pembangunan dari aspek manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari aspek bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis akan dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Memosisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif, perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2020).

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian

dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2020).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1: 8).

Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, merupakan kecamatan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks dan saat ini masih menjadi program prioritas pembangunan. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif

masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang. Kemudian, ditemukannya pola pikir masyarakat yang masih berharap dan bergantung terhadap bantuan pemerintah tanpa adanya keinginan untuk maju, berkembang dan mandiri baik secara fisik maupun ekonomi.

Pada kondisi ini pemerintah perlu melakukan suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah perlu melakukan metode pemberdayaan terhadap masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, antara lain adalah:

Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat masih belum signifikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta merubah pola pikir masyarakat untuk lebih mandiri dan berdaya secara individu atau kelompok;

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak berbasis masalah/belum menyentuh upaya penyelesaian prioritas masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat (kemiskinan, stunting, pengangguran, dan lain-lain).

Oleh karenanya, masalah pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen perubahan. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya peran-peran pihak lain agar bisa mencapai target yang diharapkan. Program pemerintah akan bisa terealisasi dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Dengan demikian fungsi koordinasi dan komunikasi seorang Camat sebagai bagian dari pimpinan pemerintahan di wilayah dalam rangka

mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan optimal.

Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyalurkan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam satu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 2020). Di bidang pemerintahan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang berkenaan dengan usaha mencapai keserasian, keseimbangan sinkronisasi, dan intergrasi keseluruhan kegiatan pemerintah, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Fungsi koordinasi ini merupakan salah satu tugas pokok dari setiap pemimpin pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan (Handyaningrat, 2020). Bertitik tolak dari konsep tersebut maka koordinasi kegiatan instansi-instansi pemerintah yang ada di kecamatan atau yang melaksanakan program/kegiatan di kecamatan, antara lain program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dikoordinasikan oleh Camat sebagai pemimpin kecamatan (UU.No.23 Tahun 2014 dan PP.No.17 Tahun 2018).

Oleh karena koordinasi merupakan upaya atau usaha untuk mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyalurkan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam satu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif, maka dengan demikian secara teoritis koordinasi Camat dapat berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat di kecamatan, dengan kata lain tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai

tujuannya akan turut dipengaruhi atau ditentukan oleh koordinasi Camat pada program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pusida, Lengkong dan Laloma (2020), Lantemona, Mantiri, dan Kasenda (2021), dan Subagio, B. (2022) menyatakan, bahwa koordinasi berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Komunikasi Camat merupakan faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Namun permasalahan yang terjadi, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Camat masih kurang optimal, karena seringkali Camat disibukan oleh tugas-tugas rutin baik di kantor maupun di tingkat Kabupaten. Kesibukan ini tentunya berpengaruh terhadap usaha pendekatan yang dilakukan oleh Camat kepada masyarakatnya. Komunikasi yang dilakukan oleh Camat sangat terbatas dan seringkali Camat mewakili tugas-tugas itu kepada bawahannya, baik Sekretaris Kecamatan maupun Kasi Trantib yang berada di kecamatan, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak efektif dan tidak mengenai sasaran. Masyarakat lebih menginginkan apa yang disampaikan diterima langsung oleh Camat bukan melalui wakilnya.

Padahal berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Akbar, M.F. (2020), Aryani dan Setyowati (2024), menyatakan, bahwa Komunikasi Camat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah salah satu cara berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Cara berpikir biasanya harus ditentukan sejak melakukan penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu rencana dan desain dari sebuah penelitian yang diawali dengan tahap menentukan hipotesis sampai diakhiri dengan kesimpulan (Creswell, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022:16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

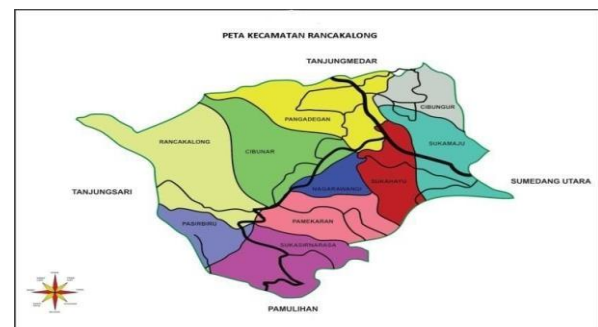
Profil Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

Menurut letak geografis, wilayah administratif Kecamatan Rancakalong berbatasan langsung dengan wilayah administratif.

Tabel Batas Wilayah Administratif

Utara	: Kecamatan Tanjungkerta dan Tanjungmedar
Selatan	: Kecamatan Pamulihan dan Tanjungsari
Barat	: Kabupaten Subang dan Kab. Bandung
Timur	: Kecamatan Sumedang Utara & Sumedang Selatan

Batas administratif Kecamatan Rancakalong tersebut terletak pada posisi Lintang Selatan dan Bujur Timur. Secara visualisasi wilayah administratif dapat dilihat dalam peta wilayah Kecamatan Rancakalong sebagai berikut :



Gambar. Peta Administratif Kecamatan Rancakalong

Pengujian Hipotesis untuk Pemberdayaan Masyarakat

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh Koordinasi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: $\beta_1 = 0$; Tidak terdapat pengaruh Koordinasi Camat terhadap Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

H1 : $\beta_1 \neq 0$; Terdapat pengaruh Koordinasi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Kemudian, dari hasil pengujian hipotesis tersebut pada Lampiran 3.4 diperoleh nilai t hitung pada Tabel Coefficient sebesar 3,128 sedangkan nilai t-tabel diperoleh 1,990, dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,128 > 1,990$) atau nilai $\text{Sig} < \text{taraf signifikan } \alpha$ ($0,002 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh Komunikasi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0: \beta_2 = 0$; Tidak terdapat pengaruh Komunikasi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

$H_1 : \beta_2 \neq 0$; Terdapat pengaruh Komunikasi Camat terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Kemudian, dari hasil pengujian hipotesis pada Lampiran 3.4 diperoleh nilai t hitung pada Tabel Coefficient sebesar 4,240, sedangkan nilai t-tabel diperoleh 1,990, dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,240 > 1,990$) atau nilai $\text{Sig} < \text{taraf signifikan } \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan

Komunikasi Camat secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”. Hipotesis tersebut di atas dapat dibuat rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0: \beta_{1,2} = 0$; Tidak terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

$H_1 : \beta_{1,2} \neq 0$; Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Lampiran 3.4 diketahui bahwa nilai F hitung pada Tabel ANOVA adalah 46,621, sedangkan nilai F-tabel adalah 3,11. Kemudian dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel, sehingga diperoleh bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($46,621 > 3,11$) dan nilai $\text{Sig} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$), Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa: “Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan, bahwa: Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Temuan penelitian tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear sederhana antara Koordinasi Camat (X_1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diperoleh bahwa nilai koefisien regresi b adalah positif 0,422 dan nilai a (constant) adalah 5,783. Dengan demikian pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $\hat{Y} = 5,783 + 0,422 X_1$.

Berdasarkan teori menunjukkan model persamaan ini memberikan informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor Koordinasi Camat (X1) akan dapat menjelaskan terjadinya perubahan skor Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 0,422 pada konstanta 5,783.

Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,128 > 1,990$) atau nilai $\text{Sig} < \text{taraf signifikan } \alpha$ ($0,002 < 0,05$). Jadi dari hasil analisis tersebut dilihat dari koefisien regresi linear sederhana dan hasil uji t menunjukkan bahwa: “Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hasil temuan penelitian tersebut di atas, sejalan dengan beberapa hasil penelitian empiris, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pusida, Lengkong dan Laloma (2020), Lantemona, Mantiri, dan Kasenda (2021), dan Subagio, B. (2022) menyatakan bahwa koordinasi berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan, bahwa: “Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Temuan penelitian tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear sederhana antara Komunikasi Camat (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diketahui bahwa nilai koefisien regresi b yang diperoleh adalah 0,611 dan nilai a (constant) adalah 5,783. Dengan demikian pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $\hat{Y} = 5,783 + 0,611 X2$. Berdasarkan teori menunjukkan model persamaan ini memberikan informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor Komunikasi Camat (X2) akan dapat menjelaskan terjadinya perubahan skor Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 0,611 pada konstanta 5,783. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,240 > 1,990$) atau nilai $\text{Sig} < \text{taraf signifikan } \alpha$ ($0,000 < 0,05$).

Jadi dari hasil analisis tersebut dilihat dari koefisien regresi linear sederhana dan hasil uji t menunjukkan bahwa: “Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hasil temuan penelitian tersebut di atas, sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Akbar, M.F. (2020), Aryani dan Setyowati (2024), yang menyatakan bahwa Komunikasi Camat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan demikian, Komunikasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, Komunikasi Camat yang ditunjukkan oleh Camat akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan, bahwa: ”Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang”.

Hasil temuan di atas dapat dikemukakan, bahwa hasil analisis regresi linear berganda dari pengaruh Koordinasi Camat (X1) dan Komunikasi Camat (X2) secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diperoleh bahwa nilai koefisien regresi $b_1 = 0,422$ dan $b_2 = 0,611$ dengan nilai a (constant) = 5,783. Dengan demikian pola hubungan pasangan variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi $\hat{Y} = 5,783 + 0,422 X1 + 0,611 X2$. Berdasarkan teori menunjukkan model persamaan ini memberikan informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat akan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan skor Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,422 dan 0,611 pada konstanta 5,783. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi adalah positif dan signifikan.

Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($46,621 > 3,11$) dan nilai $\text{Sig} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian variabel Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan besarnya pengaruh atau kontribusi variabel Koordinasi Camat (X_1) dan Komunikasi Camat (X_2) secara bersama-sama terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) ditunjukkan oleh nilai Adjusted R square (Adjusted R^2) pada tabel Model Summary, nilai tersebut adalah sebesar 0,524 yang dapat dilihat pada Lampiran 3.4. Secara statistik ini memberikan pengertian bahwa 52,4% Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi oleh pasangan Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat, dan 47,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti.

Keterkaitan hasil temuan penelitian tersebut di atas dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian, dimana permasalahan utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, antara lain adalah :

1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat masih belum signifikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta merubah pola pikir masyarakat untuk lebih mandiri dan berdaya secara individu atau kelompok;
2. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak berbasis masalah/belum menyentuh upaya penyelesaian prioritas masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat (kemiskinan, stunting, pengangguran, dan lain-lain).

Oleh karenanya, masalah pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dicarikan solusinya, agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen

perubahan. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat secara langsung harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dengan melibatkan masyarakat setempat untuk dapat berpartisipasi agar bisa mencapai target yang diharapkan. Program pemerintah akan bisa terealisasi dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Dari solusi tersebut, berbagai program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berikut ini ada tiga kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Koordinasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Koordinasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Terdapat pengaruh Komunikasi Camat yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, Komunikasi Camat merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.
3. Terdapat pengaruh Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan besarnya pengaruh 52,4% dan 47,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti. Dengan demikian variabel Koordinasi Camat dan Komunikasi Camat secara bersama-sama merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Camat Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar dapat senantiasa meningkatkan koordinasinya dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal mengkomunikasikan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Perihal ini diperoleh berdasarkan penilaian responden, bahwa indikator tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam koordinasi Camat.
2. Disarankan kepada Camat Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar dapat meningkatkan komunikasinya, khususnya kemampuan dalam memahami maksud pesan yang disampaikan. Karena, berdasarkan penilaian responden, bahwa indikator tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam komunikasi Camat.
3. Disarankan kepada Camat Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, agar dapat meningkatkan dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kemampuan dalam membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural yang menghambat (enabling), dan kemampuan dalam menyokong atau mendukung masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan (supporting). Karena, berdasarkan penilaian responden, bahwa kedua indikator tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2019. Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cangara, H. 2018. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. & J. David Creswell. 2018. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth Edition. SAGE Publications, Inc.
- Cutlip, S. M., Center, A. H. dan Broom, G. M. 2018. Effective Public Relations. Jakarta: Kencana.
- Effendy, O. U. 2019. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Farland, D.E.M.C. 2018. Management Principles and Management. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gaffar, A. 2019. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2020. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2020. Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang: Yogi Pratama.
- Hasan, Iqbal. 2019. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haudi. 2021. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Koontz, H. dan O'Donnel, C. dan Weihrich, H. 2018. Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kotter, J. P., Heskett, James L. 2017. "Corporate Culture and Performance: Dampak Budaya Perusahaan terhadap Kinerja". Jakarta: PT. Prenhallindo
- Labolo, M. 2022. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Bogor: Ghalia Indonesia
- Liliweri, A. 2019. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Mahsun. 2021. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada
- Muslimin, A. 2019. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumni.
- Ndraha, T. 2020. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningrat, B.S. 2020. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Potter, P., Perry, A., Stockert, P., dan Hall, A. 2017. Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 9th Ed. St. Louis, MI: Elsevier Mosby
- Rasyid, R. 2020. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia
- Ridwan H.R. 2021. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press
- S.F. Marbun. 2021. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Liberty
- Stoner, A. F, dan Freeman, E. 2016. Manajemen, Terjemahan: Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo.
- Stoner, J. A. F. and Charles Wankel. 2019. Manajemen, Terjemahan: Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo
- Strauss, A. dan Corbin, J. 2019. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandha, D. 2019. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia.
- Sudjana. 2018. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2018. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsaputra, Uhar. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama
- Sukmalana, S. 2018. Metode dan Tehnik Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi). Jakarta: Universitas Suryadharma.
- Susetyo, B. 2017. Statistika Untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafie, I.K. 2021. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, I. K. 2021. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT PERCA.
- Syafrudin, A. 2018. Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung: Tarsito
- Sutoro Eko, et. al. 2020. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta : FPPD
- Thoha, M. 2023. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Vardiansyah, D. 2020. Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Indeks
- Winardi. 2018. Dasar- Dasar Ilmu Manajemen. Bandung: Penerbit Alumni.
- Akbar, M.F. 2020. Peran Komunikasi Organisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung, Vol. 12 (12), 41-56
- Aryani dan Setyowati. 2024. Strategi Komunikasi Pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY Sebagai Implementasi CSR Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Komunikasi Pemberdayaan. Vol. 3 (1), 47-62
- Istiqamah, Razak dan Wardah. 2024. Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Unismuh, Vol. 5 (3), 650-663.
- Lantemona, Mantiri, dan Kasenda. 2021. Masyarakat Desa di Kecamatan Modayag. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 (2),
- Pusida, Lengkong dan Laloma. 2020. Pengaruh Koordinasi Camat Terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan Essang Selatan Kabupaten
Kepulauan Talaud.

Subagio, B. 2022. Pelaksanaan Koordinasi
Program Pembangunan Prasarana
Pendukung Desa Tertinggal dan
Manajemen Pembangunan Partisipatif
serta Pengaruhnya terhadap
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan. Jurnal Pembangunan dan
Kebijakan Publik, Vol. 2 (1), 8-12.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018
Tentang Kecamatan

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Kader Pemberdayaan Masyarakat.